

STRATEGI DAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN TANGERANG

Dinda Yusti Suhaedah, Udin Syamsudin, Thita Moraltha Mazya

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

Author Corresponding:
Dinda Yusti Suhaedah

Abstract.

The government as a service provider is required to provide satisfactory services to the community. Especially for the agricultural sector on the grounds that the agricultural sector is a provider of food and processing raw materials. Cooperation from related parties is needed in order to minimize food security problems, therefore the government must have a strategy in order to maximize food security in Tangerang Regency. This study aims to determine strategies and policies for food security in Tangerang District. This study uses food security analysis from FAO (1996) and the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2015 and is strengthened by the public strategy put forward by Geoff Mulgan (2009). The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the study show that the implementation of strategies and policies to realize food security has been going well, but the Tangerang district still has many areas that are food vulnerable. The government must ensure the availability, stability, access and good quality of food. A strategy is needed to determine goals, environmental influences, directions, actions and lessons learned in order to achieve food security. As well as supporting and inhibiting factors are also important in implementing strategies and policies.

Keywords: Strategy, Public Policy, Food Security

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, yang aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan budaya, agama, atau kepercayaan masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif, dan hidup produktif secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Definisi tersebut menguraikan faktor- faktor utama yang menentukan ketahanan pangan sebagai berikut: (1)

Ketersediaan: ketersediaan pangan yang cukup yang dapat diperoleh melalui produksi internal, pasokan eksternal, stok pangan, atau cadangan; (2) Keterjangkauan: merupakan kemampuan untuk memperoleh pangan yang cukup yang ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti harga atau daya beli, infrastruktur penyediaan pangan, dan akses jalan atau transportasi; dan (3) Pemanfaatan: mengacu pada penggunaan pangan yang tepat berdasarkan pengetahuan dasar gizi tentang konsumsi pangan dan keamanan pangan. Menurut peraturan ini, pangan meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, air, dan hasil air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Ini termasuk aditif. makanan, bahan makanan, dan perlengkapan tambahan yang diperlukan untuk memotong, mengolah, atau membuat makanan atau minuman. Makanan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di suatu negara. Kualitas sumber daya manusia suatu negara ditentukan oleh ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan perhatian yang diberikan untuk menjaga gizi yang sehat. Oleh karena itu, agar suatu negara dapat bertahan dan masyarakat memiliki akses terhadap pangan, maka kualitas sumber daya manusianya harus diperhatikan dengan seksama. Salah satu aspek ketahanan pangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa permasalahan yang masih berkaitan dengan 3 pilar ketahanan pangan terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang.

Pertama adalah semakin berkurangnya ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri akibat alih fungsi lahan pertanian yang semakin banyak terjadi setiap tahun untuk membuka jalan bagi pabrik atau pemukiman. Terakhir, ada kebutuhan yang meningkat akan lahan untuk pengembangan perumahan dan komersial. Pengurangan lahan pertanian akan menyebabkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan terjadi akibat keadaan darurat seperti halnya di wilayah Kabupaten Tangerang yang mengalami penurunan produksi pertanian dan peningkatan jumlah penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang lebih kepada industri.

Kedua, distribusi dan cadangan pangan terkait erat dengan akses. Gangguan distribusi diperkirakan dapat menyebabkan kelangkaan pasokan, yang dapat menaikkan harga dan meningkatkan ekspektasi inflasi masyarakat, menurut Sukartiningsih et al. (2019). Akibatnya, faktor distribusi dianggap penting. Selain faktor disrupsi terkait distribusi, perkembangan harga produk dan pengendalian inflasi juga akan

dipengaruhi oleh pengaruh komponen rantai distribusi dan kenaikan biaya distribusi. Menjaga cadangan pangan sangat diperlukan bagi warga dan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengatasi masalah keterbatasan stok pangan. Masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) yang menempatkan mereka pada resiko tinggi kekurangan gizi dan kerawanan pangan (*food insecurity*). Fluktuasi yang membuat kenaikan harga pangan mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum terutama untuk yang pendapatannya rendah. Diketahui angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Tangerang masih memiliki proporsi kemiskinan yang tinggi. Karena ada orang miskin, pendapatannya fluktuatif dan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya beli pangan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ada kelompok orang tertentu yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang terhormat, dan ini mengarah pada kemiskinan.

Ketiga adalah masalah Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan. Kebiasaan makan penduduk Kabupaten Tangerang masih menunjukkan kecenderungan pola makan yang kurang baik keragaman maupun gizi seimbang. Pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras. Masyarakat masih sangat bergantung pada beras. Karena keragaman pola makan masyarakat, termasuk penggunaan bahan makanan selain beras, termasuk umbi-umbian dan makanan hewani seperti daging, ayam, telur, susu, dan ikan, masyarakat memiliki pola konsumsi pangan yang tidak merata dan kurang memuaskan. Menurut Rachman & Ariani (2016) Ketidakseimbangan sebaran wilayah produksi dan pola konsumsi tersebut antara lain menyebabkan belum tercapainya konsumsi penduduk sesuai dengan standar ideal konsumsi pangan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keanekaragaman pangan serta keamanan pangan disebabkan karena masyarakat memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, dan juga keterbatasan dalam menilai makanan serta sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan peluang tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada pencapaian swasembada pangan, penjaminan akses rumah tangga terhadap pasokan pangan nasional dan daerah, serta penjaminan konsumsi rumah tangga yang cukup pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada sepanjang waktu. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal, teknologi mutakhir, dan peluang pasar untuk

meningkatkan ekonomi negara dan memerangi kemiskinan. Untuk kebijakan pengembangan ketahanan pangan, aturan umum berikut berlaku:

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) peningkatan kualitas sumber daya alam dan air; (b) menjamin kelangsungan produksi pangan, khususnya di dalam negeri; (c) penguatan kapasitas pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan (d) meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dengan menetapkan lahan permanen untuk produksi pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) meningkatkan infrastruktur dan fasilitas distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi komersial, sehingga menurunkan pembusukan dan kerugian pangan akibat distribusi yang tidak efektif; (b) mengurangi dan/atau meniadakan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan lintas daerah; dan (c) membangun fasilitas pengolahan dan pemasaran di daerah pedesaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi pangan serta meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Pada aspek konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) memastikan pemenuhan pangan untuk setiap rumah tangga memiliki stok pangan yang cukup dalam jumlah dan mutunya, layak konsumsi dan bergizi seimbang; (b) Mendorong, mengembangkan, menciptakan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebagai bagian dari perwujudan hak atas pangan; (c) membangun jaringan antar lembaga masyarakat untuk mewujudkan hak atas pangan; dan

(d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu (kelompok miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dll

Dari permasalahan di atas diperlukannya strategi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dengan demikian yang menjadi tema dari penelitian ini adalah yang berjudul “Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang”.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam bentuk daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tangerang dan Tokoh Masyarakat terkait ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tangerang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berasal dari pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Perencana Muda Sub Koordinator Investasi dan Usaha Daerah, Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan, Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan, Staff Bidang Ketahanan Pangan, serta beberapa perwakilan masyarakat terkait ketahanan pangan seperti Penyuluh Pertanian Lapangan, Kader PKK, Kader Posyandu, Kelompok Wanita Tani. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan Teknik *nonprobability sampling* yaitu *puposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis interaktif, yaitu dengan tahap Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Banten, yang berkontribusi besar untuk sektor pertanian. Kabupaten Tangerang memiliki luas lahan pertanian yang cukup besar. Mayoritas wilayahnya merupakan daerah pedesaan yang subur, membuatnya menjadi tempat yang cocok untuk pertanian. Melalui berbagai potensi yang ada terkait pertanian pemerintah daerah harus memanfaatkan secara optimal melalui strategi dan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi didefinisikan sebagai “asas desentralisasi” dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses pelimpahan kewenangan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengontrol pengelolaan pemerintahan dan mengembangkannya sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Pemerintah daerah seperti Kabupaten Tangerang dapat menyusun strategi dan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang berdasarkan undang-

undang ini. Ketahanan pangan terdiri dari empat unsur yaitu kualitas pangan, ketersediaan pangan, stabilitas pangan, dan aksesibilitas/ keterjangkauan pangan

1. Ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan yang cukup mewajibkan perlunya produksi pertanian yang berkelanjutan. Tanaman padi - padian, biji - bijian, sayuran, buah - buahan dan protein hewani harus tumbuh secara optimal dan terjamin pasokannya. Memastikan adanya ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat adalah salah satu pilar utama dalam mencapai ketahanan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup berarti bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pasokan pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Situasi di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa individu hanya memiliki persediaan pangan pokok yang cukup untuk periode seminggu, yang diperoleh melalui pembelian di pasar. Namun, ini tidak hanya menjadi kendala, sebab mereka juga menghadapi keterbatasan dalam hal menghasilkan makanan sendiri akibat minimnya lahan untuk produksi. Selain itu, kemampuan finansial individu untuk membeli pangan juga berada dalam kategori sedang. Keterbatasan ini dalam ketersediaan dan kapabilitas untuk membeli makanan yang mencukupi dapat berdampak terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan secara keseluruhan.

2. Stabilitas pangan

Frekuensi makan setiap rumah tangga dalam sehari memiliki dampak yang berpengaruh dalam mencerminkan kelanjutan pasokan pangan dalam rumah tangga. Jumlah makan dalam sehari tidak hanya sekedar mencerminkan pola makan tetapi juga dapat menjadi indikator keberlanjutan dan kualitas pasokan yang tersedia bagi setiap rumah tangga. Frekuensi makan yang optimal adalah 3 kali sehari yang mencakup sarapan, makan siang dan makan malam. Apabila seorang anggota dalam rumah tangga hanya dapat makan sekali atau dua kali sehari, hal ini dapat mengindikasikan adanya keterbatasan pasokan pangan atau masalah dalam aksesibilitas terhadap pangan. Dalam ketahanan pangan pemerintah dan pihak terkait harus dapat terus memantau frekuensi makan anggota dalam rumah tangga dalam sehari sebagai salah satu indikator untuk mengukur stabilitas dan keberlanjutan pasokan pangan.

Aksesibilitas/ keterjangkauan pangan merujuk pada kemampuan suatu rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan yang mencukupi secara finansial. Faktor-faktor seperti harga pangan, pendapatan, dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang atau rumah tangga

dapat membeli makanan yang diperlukan. Keterjangkauan pangan yang baik mengindikasikan bahwa harga pangan yang terjangkau dan pendapatan yang mencukupi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan asupan nutrisi yang mencukupi. Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, pemerintah memiliki peran penting. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). CPPD adalah stok beras yang dapat dikeluarkan atau disalurkan oleh pemerintah pada saat terjadi kerawanan pangan, baik karena bencana alam maupun kelangkaan pasokan pangan. Dengan adanya CPPD, pemerintah dapat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat, sehingga mempermudah akses pangan di tengah kondisi sulit.

3. Kualitas Pangan

Dalam rangka memastikan bahwa pasokan pangan yang tersedia bagi masyarakat memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi, berbagai upaya komprehensif dilakukan oleh instansi terkait. Diantaranya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Kesehatan, dan Loka Pusat Penelitian dan Pengujian Mutu Pangan (Loka POM) berperan penting dalam melakukan pengkajian dan uji laboratorium terkait keamanan dan kualitas pangan. Kebiasaan makan monoton masyarakat di kabupaten Tangerang, terutama ketika mereka berfokus hanya pada satu jenis makanan, dapat merusak kebutuhan nutrisi yang memadai untuk tubuh. Ketika individu tidak mengonsumsi berbagai macam makanan, seperti buah-buahan, sayuran, makanan kaya protein seperti hewani dan nabati, serta jenis makanan lainnya, mereka berisiko menghadapi defisiensi nutrisi. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kurangnya vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya yang penting untuk mempertahankan stamina tubuh, pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organ. Inilah faktor yang mengakibatkan kualitas pangan yang rendah di kabupaten Tangerang.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat menerapkan strategi strategis berdasarkan hal tersebut. Ketahanan pangan, sebagaimana didefinisikan oleh Oxfam (2001), adalah keadaan di mana "setiap orang memiliki akses dan kendali atas makanan dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik untuk hidup aktif dan sehat setiap saat." Di sini, ketersediaan didefinisikan sebagai kuantitas dan kualitas serta akses (hak atas makanan melalui pembelian, pertukaran, atau klaim).

Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun merupakan cetak biru dari strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Ini termasuk menetapkan target dan tujuan, menilai lingkungan, memilih tindakan, memutuskan tindakan, dan mengevaluasi pembelajaran

a) Tujuan

Menurut Arsalim & Santoso (2022) Perencanaan strategis adalah perencanaan yang mengarah pada jangka waktu yang lebih panjang. Keberadaan perencanaan strategis secara alami berfungsi sebagai alat yang menjelaskan tindakan yang diambil oleh suatu organisasi dalam jangka waktu yang luas. Perencanaan strategis dirancang untuk menghasilkan rencana yang terstruktur dengan baik dan bertujuan untuk menetapkan sasaran organisasi serta mencapai pencapaian-pencapaian tersebut. Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menjadi dasar pembangunan dan pengembangan pangan di Indonesia. Perencanaan strategi yang dilakukan dinas adalah dengan merumuskan masterplan. Masterplan itu berbentuk dokumen yang bertujuan memberikan arahan terkait lintas skala, sektor dan lintas pelaku dalam membangun ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang, menjadi panduan bagi segenap pemangku kepentingan baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam merencanakan program terkait ketahanan pangan, mengintegrasikan kebijakan dan program pemerintah dengan agenda dari para pelaku atau instansi non pemerintah dalam usaha peningkatan ketahanan pangan, sebagai suatu bentuk masukan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang mendukung ketahanan pangan, dan membantu akselerasi penyelesaian masalah terkait dengan ketahanan pangan baik dari segi ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan di Kabupaten Tangerang.

Pembuatan rencana kebijakan untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang. Lahan Pertanian Pangan Lestari didefinisikan sebagai luas lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok untuk kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Pertanian Pangan Lestari). Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, dan berfungsi sebagai model untuk Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten dan kota. Pemerintah daerah juga wajib memberikan pembinaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan dan pelestarian Lahan Pertanian Pangan Lestari.

b) Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Masalah lingkungan merupakan masalah alami menurut Nina Herlina (2017) yaitu peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari proses alam. Namun, mengingat manusia kini menjadi elemen penyumbang utama kerusakan lingkungan, masalah lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah yang terjadi secara alami. Untuk menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, perencanaan juga diperlukan.

Ketika lingkungan berubah seperti yang terjadi setelah bencana alam pemerintah harus siap dengan rencana aksi yang terorganisir. Banjir merupakan bencana alam yang umum terjadi di wilayah Tangerang. Menurut Genovese (2006) menjelaskan bahwa Kejadian banjir biasanya terjadi di daerah dataran banjir, yang telah berkembang menjadi daerah metropolitan karena banyaknya dan kebutuhan pasokan air untuk berbagai keperluan. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kota, pembangunan infrastruktur dipercepat karena laju urbanisasi yang terus meningkat. Perkembangan tersebut terus berlanjut meskipun aktivitas ini meningkatkan kerentanan bencana jika aktivitas berlangsung melebihi kapasitas wilayah terhadap perubahan. Ada tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan selain yang berkaitan dengan bencana alam. Kerentanan masyarakat menjadi indikasinya. Menurut Arif et al., (2017) mendefinisikan kerentanan sebagai tingkat kerugian yang mungkin diderita elemen yang terkena dampak sebagai akibat dari risiko tertentu, tergantung pada tingkat keparahan situasinya. Ada beberapa faktor yang menentukan

kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana: situasi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta aktivitas yang terjadi di dalamnya.

Pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang konteks seputar ketahanan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah harus memasukkan tujuan masyarakat ketika mengembangkan rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena dapat meningkatkan standar strategi kebijakan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu publik, meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan yang diterapkan, dan berkontribusi pada pembangunan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif. Proses penyusunan rencana dimulai pada tahap perencanaan Pembangunan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menyatakan: “melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh setiap tingkat pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan.” Musrembang tingkat kecamatan dan desa akan digelar terlebih dahulu.

c) Pengarahan

Pengarahan adalah proses dimana pimpinan memberikan petunjuk, instruksi, dan bimbingan kepada bawahan agar mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan mencapai tujuan sesuai perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan pengarahan, seorang manajer biasanya menggunakan cara-cara seperti memberikan motivasi dan perintah kepada bawahan. Menurut Siswanto (2007: 111) menyatakan "Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan".

Pemerintah harus dapat mengkomunikasikan pengarahan strategi ketahanan pangan kepada masyarakat ataupun pemangku kepentingan lain untuk memastikan pemahaman yang baik. Namun informasi perihal ketahanan pangan terkadang tidak sampai kepada masyarakat dikarenakannya kurangnya keinginan diri untuk mencari tahu atau bahkan memang karena kurangnya pemberitahuan dari pemerintah. Oleh sebab itu, perlu diadakannya pengarahan, sosialisasi dan kampanye - kampanye yang terjadwal guna memberi pengetahuan pada masyarakat sekaligus mendorong

kesadaran diri. Pemerintah harus memiliki strategi komunikasi dalam penyampaian informasi atau pengarahan. Dalam Penelitian oleh Nifri et al., (2023), Middleton (1980), seorang pakar perencanaan komunikasi mendefinisikan strategi komunikasi sebagai “kombinasi yang tepat dari semua elemen komunikasi, termasuk komunikator, pesan, saluran (Media), penerima, hingga efek yang direncanakan untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

d) Aksi/ Tindakan

Untuk dapat mengurangi isu-isu terkini, pemerintah harus menerapkan strategi dan program melalui tindakan seperti: penyusunan komisi irigasi, penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi, penyusunan indeks ketahanan pangan, peningkatan kerjasama kebutuhan pangan. Selain menyelesaikan masalah sosial, pemerintah juga memelihara cadangan pangan, baik pemerintah maupun masyarakat, yang diperoleh dari kelompok tani yang ada di seluruh Kabupaten Tangerang. Tutesa & Wisman (2020) mengklarifikasi bahwa masalah ini bersifat sosial karena berkaitan dengan interaksi manusia dan terjadi dalam konteks unsur budaya normatif. Karena dikaitkan dengan gejala yang mengganggu kemampuan masyarakat untuk berumur panjang, hal ini disebut sebagai masalah. Perbedaan antara aspek budaya atau masyarakat yang membahayakan kesejahteraan kelompok sosial disebut masalah sosial. Atau, menghambat kemampuan anggota kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan fundamentalnya dan melemahkan ikatan sosial.

e) Pembelajaran

Pembelajaran atau *best practice* dalam konteks perencanaan strategi sering diartikan sebagai metode atau proses yang telah diketahui oleh siapapun sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan tertentu atau hasil yang diinginkan. *Best practice* didasarkan pada pengalaman dan penelitian yang telah terbukti efektif dalam kondisi tertentu, dan bisa digunakan oleh organisasi atau individu lain untuk meningkatkan kinerja atau hasil yang diinginkan. Strategi yang berhasil di masa lalu tidak selalu berlaku untuk masa depan pembelajaran membantu pemerintah atau pemangku kepentingan lain untuk lebih sensitif terhadap perubahan dan beradaptasi dengan cepat dan tepat untuk tetap relevan dan kompetitif. Perlu dilakukannya evaluasi secara terus menerus dengan begitu dapat dengan mudah mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat

serta apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi kebijakan ketahanan pangan. Mohammad Ali (2014) mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Sedangkan Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

II. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan penelitian mereka, para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah variabel yang memfasilitasi dan menghambat pelaksanaan rencana dan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal baik dalam mendukung suatu kegiatan dari strategi dan kebijakan dapat digunakan sebagai daya dorong untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang, antara lain :

a. Dukungan dari pemerintah

Peneliti melihat pemerintah sangat mendukung beberapa kegiatan/ program untuk mengatasi masalah pangan berupa anggaran yang diberikan ataupun peraturan bupati sebagai wujud pemerintah bersungguh – sungguh dalam menyelesaikan masalah. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pangan terlebih untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti halnya untuk mengatasi permasalahan stunting dan kegiatan penganekaragaman pangan pangan lokal. Dalam menghadapi permasalahan stunting pemerintah gencar memberikan penyuluhan terhadap anak-anak usia sekolah melalui program minum pil tambah darah untuk mencegah anemia atau penyuluhan terkait makanan yang bergizi yang rutin

dilakukan untuk penurunan tingkat stunting sampai Zero. Sedangkan untuk pemanfaatan konsumsi pangan pemerintah memberikan pembinaan sosialisasi terhadap PKK, kader Posyandu dan kelompok wanita Tani yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber pangan atau mulai mendiversifikasi pangan yang ada di dalam negeri.

b. Adanya sikap terbuka antar *stakeholder*

Sikap terbuka harus dimiliki para *stakeholder* yang berarti menunjukkan keterimaan, keterbukaan dan kemauan untuk menerima dan mendengarkan pandangan serta ide dari berbagai pihak tanpa mendiskriminasi atau mengabaikan pihak-pihak tertentu dan semua pihak diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan pandangan dan memberikan kontribusi pengetahuan serta pengalaman dalam proses perencanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi jalannya proses perencanaan.

c. Semangat Masyarakat

Semangat dari sebagian masyarakat dilihat dari antusiasme dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan ataupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan dan kontribusi positif dari para anggota masyarakat dalam proses pembelajaran pembinaan ataupun penyuluhan terkait permasalahan ketahanan pangan. Untuk terus menciptakan semangat masyarakat dalam berpartisipasi maka pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut relevan, menarik dan bermanfaat bagi masyarakat karena masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menghambat ataupun menghalangi keberhasilan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan, antara lain :

- Distribusi yang tidak regular.

Kabupaten Tangerang diketahui memiliki jumlah penduduk yang banyak tetapi minim lahan produksi pangan yang mengakibatkan kerentanan pangan. Mengarah pada kendala yang terjadi dalam proses distribusi bahan pangan dari produsen atau penyedia ke konsumen atau penerima akhir. Hal ini khususnya terkait dengan pasokan pangan yang

mencakup berbagai jenis makanan dan kelompok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat alasan yang menyebabkan distribusi yang tidak reguler antara lain 1) ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan pangan menyebabkan fluktuasi stok dan pasokan. 2) bencana alam atau peristiwa eksternal lainnya yang mengganggu transportasi dan akses. Dari hal tersebut pemerintah produsen dan stakeholder harus mampu mengatasi permasalahan ini dengan upaya meningkatkan efisiensi mengoptimalkan jalur distribusi dan mengelola stok pangan dengan baik guna memastikan ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh populasi

- Pengetahuan yang kurang dan sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat.

Masih ada beberapa masyarakat yang minim pengetahuan diketahui karena masyarakat tersebut kurang peduli terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan seperti tidak peduli atau tidak mau ikut serta dalam kegiatan sosialisasi. Menjadi masalah serius dalam suatu daerah. Pengetahuan merupakan hal yang penting dalam memberdayakan masyarakat meningkatkan kesadaran akan permasalahan dan mempersiapkan mereka menghadapi perubahan atau tantangan. Pentingnya juga untuk memiliki kesadaran dalam memilih pangan yang beraneka ragam. Namun merubah kebiasaan masyarakat dalam memilih pangan dengan menggantikan beras bisa menjadi tantangan yang kompleks, mengingat beras telah menjadi komponen yang tak terpisahkan dari budaya, tradisi, serta pola makan di banyak komunitas, khususnya di sejumlah negara Asia.

KESIMPULAN

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga di Kabupaten Tangerang ditempatkan pada kategori sedang ketika pangan pokok tersedia secara mingguan, sementara keluarga tidak memiliki lahan untuk produksi pangan dan memiliki kemampuan finansial yang sedang dalam membeli kebutuhan pangan pokok. Stabilitas pangan masyarakat Kabupaten Tangerang menunjukkan tingkat yang tinggi, di mana frekuensi makan telah mencapai tiga kali sehari dan konsumsi pangan terpenuhi. Aksesibilitas pangan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang sebagian besar berada pada kategori rendah. Hal ini ditunjukkan oleh ketidakadaan lahan sawah atau ladang di

rumah tangga, kebutuhan makanan dipenuhi melalui pembelian dengan daya beli yang rendah, jarak antara rumah dengan warung atau pasar yang lebih dari 3 km, serta kurangnya jaringan sosial yang baik dengan kepala keluarga lain. Kualitas pangan yang dijalani oleh masyarakat Kabupaten Tangerang dinyatakan rendah, dengan ciri-ciri konsumsi pangan yang kurang beragam.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang telah secara efisien mencapai tujuannya dan melaksanakan perencanaan strategisnya. Mencegah dan mengatasi kerawanan pangan dan gizi merupakan salah satu strategi yang digunakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang untuk mencapai ketahanan pangan. Dalam menghadapi permasalahan dengan lingkungan pemerintah berkolaborasi dengan pihak terkait seperti komunitas petani ataupun lembaga lingkungan melalui partisipasi kegiatan musyawarah rencana Pembangunan. Arahan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam mengarahkan masyarakat ataupun pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, sosialisasi, kampanye ataupun penyuluhan. Tindakan pemerintah dalam membuat langkah-langkah untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tangerang seperti penyusunan rencana aksi dan sebagainya. Pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai evaluasi merupakan acuan dalam keberhasilan atau kegagalan dari strategi kebijakan

Menilik isinya secara keseluruhan, jelas bahwa penyelenggaraan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan menitikberatkan pada diversifikasi dan peningkatan produksi pangan dalam negeri. Realisasi ketersediaan pangan secara fisik dan finansial dilakukan melalui distribusi bahan pangan pokok, distribusi cadangan pangan, dan pengelolaan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok. Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui upaya menjamin konsumsi pangan dan asupan gizi. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan ragam makanan yang mengandung gizi seimbang serta memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi pangan (B2SA).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, D. A., Mardiatna, D., & Giyarsih, S. R. (2017). Kerentanan Masyarakat Perkotaan terhadap Bahaya Banjir di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanipura, Kota Jambi. *Majalah Geografi Indonesia*, 31(2), 1. <https://doi.org/10.22146/mgi.25493>

- Arsalim, & Santoso, B. (2022). Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Inovasi Pemanfaatan Pupuk Organik di Desa Lalosingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 63–70. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.pdf>.
- Dewan Ketahanan Pangan. (2009). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009. *Gizi Dan Pangan*, 1(1), 57–63.
- Genovese, E. (2006). A methodological approach to land use-based flood damage assessment in urban areas: Prague case study. *European Communities, DG-JRC, Ispra, EUR*, 39. http://www.preventionweb.net/files/2678_EUR22497EN.pdf
- Latifah, U., Purnamasari, H., & Azizah, A. N. (2022). Manajemen Strategi Dinas Pertanian Dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(2), 444. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.444-452>
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy* (1st ed.). Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GZh2z6wZ-asC&oi=fnd&pg=PR7&ots=>
- Nifri, L., Andini, S., Vista, W., & Puspa, C. (2023). *STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI DI MASA PANDEMIC COVID-19*. 2(2), 71–75.
- Nina Herlina. (2017). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.
- Triyono Kharis. (2013). Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Ketahanan Pangan. *Jurnal Inovasi Pertanian* , 11(1), 12–22.
- Tutesa, & Wisman, Y. (2020). *Permasalahan Sosial Pada Masyarakat*. 2020(12), 94–99.
- Wijianingsih, P. (2008). *Peralihan potensi lahan pertanian untuk kawasan industri di kabupaten tangerang*.